

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Gereja atau Paroki memiliki struktur organisasi yang didalamnya terdapat berbagai fungsi yang saling terkoordinasi. Struktur organisasi tersebut diperlukan adanya suatu struktur pengendalian intern yang memadai. Struktur intern yang diterapkan dalam organisasi Gereja dapat menciptakan suatu pengawasan dan koordinasi setiap fungsi yang baik. Struktur pengendalian intern dapat membantu dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan operasi serta mendeteksi adanya penyimpangan. Informasi tentang pengendalian intern ini berkaitan erat dengan laporan keuangan dan juga pengendalian intern berpengaruh pula ke masa depan, karena pengendalian intern yang efektif akan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya salah saji dalam laporan keuangan yang akan datang.

Selain bermanfaat bagi organisasi, struktur pengendalian intern juga memegang peranan penting dalam proses audit. Standar pekerjaan kedua yang dinyatakan oleh IAI mengemukakan bahwa pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.

Struktur pengendalian juga mempunyai pengaruh yang besar atas kelayakan laporan keuangan. Lemahnya sistem pengendalian intern dapat menimbulkan peluang terjadinya penyimpangan atas kesalahan. Sebelum

melakukan pemeriksaan, akuntan harus mempelajari dan menilai struktur pengendalian intern untuk menentukan dapat atau tidaknya sistem tersebut dipercaya sebagai dasar untuk menetapkan luasnya pengujian dan untuk menetapkan prosedur audit yang akan digunakan.

(Mulyadi, 1992; 105).

Pada tahun 1992, *Committee of Sponsoring Organizations* dari *Treadway Committe* (COSO) mengeluarkan, *Internal Control-Integrated Framework*. Laporan ini menyajikan kerangka kerja pengendalian intern umum yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan semua kelompok yang terkait dengan pengendalian internal: manajemen suatu entitas, auditor eksternal dan internal, kepala bagian keuangan, akuntansi manajemen, serta badan legislatif dan pembuat aturan. Badan tersebut juga menetapkan standar atau kriteria untuk mengevaluasi pengendalian intern.

Auditing Standard Board mengakui bahwa laporan COSO diterima secara luas diantara kelompok-kelompok yang disebutkan diatas. Pihak manajemen dan departemen audit internal dari beberapa entitas yang berorientasi laba ataupun nirlaba menggunakan laporan itu untuk mengimplementasikan dan mengevaluasi pengendalian internal. Badan legislatif dan pembuat peraturan memasukkan COSO tersebut dalam hukum dan perundang-undangan. Auditor eksternal mengadopsi laporan COSO dalam standar profesional dengan dikeluarkannya *SAS No. 785*, dan kemudian mengamandemenkan *SAS No. 55* dengan ditambahkannya kriteria COSO. Pada hakikatnya *SAS No. 55* sebagaimana diamandemenkan adalah standar profesional utama dalam

mengimplementasikan standar kedua pekerjaan lapangan, maka laporan COSO memiliki pengaruh yang penting terhadap standar audit.

Gereja atau Paroki merupakan salah satu bentuk organisasi sektor publik. Dimana dalam organisasi Gereja ini juga dibutuhkan adanya suatu struktur pengendalian intern yang baik. Relasi Gereja dengan uang dan harta benda sudah terjadi sejak awal berdirinya. Perhatian Gereja terhadap pengelolaan harta benda gerejawi sangat besar mengingat hukum Gereja mewajibkan adanya Dewan Keuangan di setiap Paroki. Saat ini Gereja semakin dituntut untuk mengelola uang dan harta benda miliknya agar dapat dilakukan secara kredibel: transparan dan akuntabel (PTKAP, 2008; v).

Dalam mengelola keuangan Paroki khususnya di wilayah Keuskupan Agung Semarang. Pedoman yang digunakan adalah Memo Uskup Keuskupan Agung Semarang No. 0459/c/a-4/08 tentang Rekomendasi Pemakaian Petunjuk Teknis Keuangan dan Akuntansi Paroki (PTKAP). Petunjuk Teknis Keuangan dan Akuntansi Paroki ini merupakan sarana yang penting untuk mengelola harta benda Gereja, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara obyektif, karena sistimatis dan terstruktur sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu akuntansi.

Gereja Hati Santa Perawan Maria Tak Bercela Kumetiran Yogyakarta yang juga masuk dalam wilayah Keuskupan Agung Semarang sudah menerapkan PTKAP sejak tahun 2008 (sejak dianjurkan). Proses Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Keuangan dan Akuntansi Paroki (PPKAP), juga wajib memasukkan unsur pengendalian intern yang baik, yaitu:

1. Pembagian tugas dalam pengelolaan keuangan khususnya yang berkaitan dengan kewenangan otorisasi (pemberian persetujuan), pencatatan transaksi, penyimpanan uang dan pengelolaan Aktiva Tetap (Harta Benda Gereja selain uang).
 2. Prosedur pencatatan transaksi keuangan, contoh; prosedur penerimaan kolekte harus dibuat dan ditetapkan sedemikian rupa sehingga kebocoran (penyelewengan) tidak terjadi.
 3. Pemberian nomor urut tercetak pada setiap dokumen akuntansi yang digunakan.
 4. Dokumentasi yang baik untuk setiap transaksi keuangan yang mencakup pemberian nomor bukti transaksi dan penyimpanan secara rapi sehingga pencarian kembali mudah dilakukan.
 5. Monitoring secara berkala dan berjenjang atas pengelolaan keuangan dan proses akuntansi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang.
 6. RAPB dan RAI yang disusun berdasarkan visi, misi dan fokus pastoral Paroki.
 7. Laporan keuangan yang tepat waktu.
- (PTKAP, 2008; 198).

Penerimaan kas dalam Gereja sangat berkaitan erat dengan laporan keuangannya, oleh karena itu juga membutuhkan suatu sistem pengendalian intern dengan tujuan agar tidak terjadi penyelewengan-penyelewengan ataupun penggelapan. Berdasarkan PTKAP penerimaan kas digolongkan kedalam pos-pos

rekening, antara lain: Penerimaan Kolekte dan Persembahan, Penerimaan Sumbangan Bebas, Penerimaan Devosonalia, Penerimaan Subsidi, Penerimaan Lain-lain, Penerimaan Dana KBP, Penerimaan APP & Kolekte Khusus, serta Penerimaan untuk maksud tertentu (PTKAP, 2008; 120-124)

Gereja Kumetiran memerlukan pengendalian intern yang efektif untuk menentukan keandalan laporan keuangan. Efektivitas pengendalian intern ini dapat mencegah terjadinya salah saji yang material. Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai pengendalian intern penerimaan kas pada Gereja Kumetiran dan tertarik untuk mengambil judul **“Evaluasi Struktur Pengendalian Intern Penerimaan Kas Paroki Hati Santa Perawan Maria Tak Bercela Kumetiran Yogyakarta ”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apakah pengendalian intern penerimaan kas pada Gereja Hati Santa Perawan Maria Tak Bercela Kumetiran Yogyakarta sudah efektif?

1.3. Batasan Masalah

Untuk membatasi pembahasan agar tidak terlalu meluas dan tetap terarah pada penyelesaian masalah, maka dalam penelitian ini batasan masalahnya adalah:

1. Struktur pengendalian intern dibatasi terhadap penerimaan kas yang sudah dilakukan pada Gereja Hati Santa Perawan Maria Tak Bercela Kumetiran Yogyakarta periode bulan Januari - Desember tahun 2008.
2. Lingkungan pengendalian dibatasi pada struktur organisasi, metode pemberian wewenang, tanggung jawab serta kebijakan dan praktik karyawan atau pihak yang bersangkutan dan sistem akuntansi pada penerimaan kas.
3. Kriteria struktur pengendalian intern dinilai dengan memperhatikan lima komponen pengendalian intern menurut *Committee of Sponsoring Organizations (COSO)*.

1.4. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi kepatuhan dan efektivitas pengendalian intern atas penerimaan kas yang terjadi pada Gereja Hati Santa Perawan Maria Tak Bercela Kumetiran Yogyakarta.

1.5. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini, diharapkan hasilnya dapat bermanfaat bagi:

1. Gereja Hati Santa Perawan Maria Tak Bercela Kumetiran Yogyakarta

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar acuan bagi Gereja Hati Santa Perawan Maria Tak Bercela Kumetiran Yogyakarta dalam melaksanakan struktur pengendalian intern yang akan ataupun yang

sudah dilaksanakan dalam Gereja, dan diharapkan dapat juga memberikan masukan kepada Gereja sekiranya langkah-langkah apa yang diperlukan untuk memperbaiki sistem pengendalian intern penerimaan kas yang sudah dilaksanakan oleh Gereja.

2. Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menerapkan pengetahuan akademis yang selama ini diperoleh di bangku kuliah serta membandingkan ilmu yang sudah diterima selama kuliah dengan kenyataan yang sebenarnya.

1.6. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek penelitian dari pengujian ini adalah Struktur Pengendalian Intern Penerimaan Kas yang dilakukan pada Gereja Hati Santa Perawan Maria Tak Bercela Kumetiran Yogyakarta.

2. Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Laporan penerimaan kas tahun 2008 pada Gereja Hati Santa Perawan Maria Tak Bercela Kumetiran Yogyakarta.
- b. Struktur organisasi (Dewan Paroki) Gereja Hati Santa Perawan Maria Tak Bercela Kumetiran Yogyakarta.
- c. Tugas, wewenang dan tanggung jawab tiap-tiap Dewan Paroki Gereja Hati Santa Perawan Maria Tak Bercela Kumetiran Yogyakarta.

d. Gambaran Umum Gereja Hati Santa Perawan Maria Tak Bercela Kumetiran Yogyakarta.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah suatu prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam mengumpulkan data untuk penelitian ini, peneliti menggunakan 3 prosedur audit yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer merupakan data-data yang diperoleh langsung dari sumbernya dengan melakukan :

- 1) Pengamatan (observasi), merupakan kegiatan yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung kepada objek penelitian untuk mendapatkan data pelaksanaan pembelian bahan baku.
- 2) Wawancara, dengan pihak-pihak yang berwenang dalam perusahaan.
- 3) Pemeriksaan (inspeksi) dokumen-dokumen terkait, misalnya berita acara penghitungan kolekte, bukti penerimaan kas, dan slip setoran bank.

b. Data sekunder merupakan data yang menunjang data primer. Data ini diperoleh dari data yang telah disalin, diterjemahkan dan dikumpulkan dari berbagai sumber sebagai dasar dalam menganalisis objek penelitian.

4. Alat Analisa Data

Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengujian pengendalian intern adalah sebagai berikut:

a. Melakukan evaluasi pemahaman atas struktur pengendalian intern penerimaan kas pada Gereja Hati Santa Perawan Maria Tak Bercela Kumetiran Yogyakarta yang dievaluasi berdasarkan kriteria pengendalian intern yang baik adalah:

a. Struktur organisasi, elemen ini digunakan untuk melihat apakah adanya pemisah antara tugas, wewenang dan tanggung jawab fungsional yang jelas.

b. Transaksi yang terjadi harus diotorisasi pihak berwenang, untuk melihat apakah sistem wewenang dan prosedur pencatatan sudah dilakukan dengan baik dan benar.

c. Formulir bernomor urut tercetak untuk melihat praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi tiap bagian organisasi.

b. Mengidentifikasi salah saji yang potensial yang dapat terjadi dalam asersi entitas.

Melakukan identifikasi salah saji potensial yang dapat terjadi dalam asersi yang berkaitan dengan setiap saldo yang signifikan.

c. Mengidentifikasi pengendalian yang diperlukan untuk mencegah atau mendeteksi dan memperbaiki salah saji.

Semua unsur pengendalian intern harus dipertimbangkan dalam melakukan identifikasi pengendalian. Unsur tersebut ada lima golongan, yaitu:

- 1) Lingkungan pengendalian
 - 2) Penilaian resiko
 - 3) Aktivitas pengendalian
 - 4) Pemrosesan informasi dan komunikasi
 - 5) Pemantauan atau *monitoring*
- d. Melakukan pengujian pengendalian terhadap pengendalian yang diperlukan untuk menentukan efektivitas atas struktur pengendalian intern.

Melakukan pengujian pengendalian terhadap pengendalian yang diperlukan dengan menggunakan metode *attribute sampling* model *stop-or-go sampling*. Langkah-langkah yang diperlukan adalah:

- 1) Tentukan *desired upper precision limit* dan tingkat keandalan.

Pada tahap ini, akuntan menentukan tingkat keandalan yang akan dipilih dan tingkat kesalahan maksimum yang masih dapat diterima. Tabel yang tersedia dalam *stop-or-go sampling* ini meyarankan akuntan untuk memilih tingkat kepercayaan 90%, 95%, atau 97,5%.

- 2) Gunakan tabel besarnya sampel minimum untuk pengujian pengendalian intern guna menentukan sampel pertama yang harus diambil.

Setelah tingkat keandalan dan *desired upper precision limit* (DPUL) ditentukan, langkah berikutnya adalah menentukan besarnya sampel minimum yang harus diambil oleh akuntans dengan bantuan Tabel Besarnya Sampel Minimum untuk Pengujian Kepatuhan. Jika pengendalian intern klien baik, akuntan disarankan untuk tidak menggunakan tingkat keandalan kurang dari 95% dan menggunakan *desired upper precision limit* lebih dari 5%. Dengan demikian pada umumnya dalam pengujian kepatuhan, akuntan tidak pernah memilih besarnya sampel kurang dari 60.

3) Buat tabel *stop-or-go decision*.

Setelah besarnya sampel minimum ditentukan, langkah selanjutnya adalah membuat tabel *stop-or-go decision*. Dalam tabel *stop-or-go decision* tersebut, akuntan akan mengambil sampel sampai 4 kali. Umumnya, dalam merancang tabel *stop-or-go decision* akuntan jarang merencanakan pengambilan sampel lebih dari 3 kali.

4) Evaluasi hasil pemeriksaan terhadap sampel.

Jika DUPL (*desired upper precision limit*) = AUPL (*achieved upper precision limit*) maka unsur pengendalian yang dinilai adalah efektif.

1.7. Sistematika Pembahasan

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Pengendalian Intern Penerimaan Kas

Bab ini berisi landasan teori yang mendasari dan akan menjelaskan pembahasan masalah.

BAB III Gambaran Umum Organisasi

Bab ini berisi sejarah Gereja Kumetiran Yogyakarta, struktur organisasi, serta fungsi-fungsi yang terkait dengan struktur pengendalian intern penerimaan kas.

BAB IV Analisis Data

Berisi tentang analisa data hasil penelitian mengenai evaluasi efektivitas pengendalian intern penerimaan kas.

BAB V Penutup

Berisi tentang kesimpulan dari seluruh hasil penelitian dan saran.